

**EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI
SEDATIGEDE SIDOARJO**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

INDRIANI

1913111045

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK B
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

**EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI
SEDATIGEDE SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik



Disusun Oleh :

INDRIANI

1913111045

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK B
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD) DI SEDATIGEDE SIDOARJO

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh:

INDRIANI

1913111045

Diperiksa dan disetujui oleh

Pembimbing I



Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Pembimbing II



Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD) DI SEDATIGEDE SIDOARJO

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya**

Disusun oleh:

INDRIANI

1913111045

Tanggal Ujian : 24 Juli 2023

Periode Wisuda :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Pembimbing II



Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Penguji II



Dr. Susi Ratnawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0717117001

Penguji III



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Tri Prasetijowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Menyetujui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

MOTTO

“Only god can judge me”

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S AL-Baqarah; 286)

Kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan, jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba, setidaknya satu kali lagi

~ Thomas A. Edison~

Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang hakiki

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Q.S Al-Baqarah: 286 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan dia mendapatkan (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lrmbar persembahan. Alhamdulillahirobbil’alamin, dengan mengucapkan rasa syukur atas rahmat Allah SWT, sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Pertama untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mampu berada di titik ini.
2. Kedua orang tua saya Bapak Iwan dan Ibu Sita Hastarita yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya kepadaku, selalu memberi semangat untuk mewujudkan cita-citaku. Terimakasih atas do’a dan dukungannya yang selalu diberikan untukku dan terimakasih telah menjadi penyemangat dalam dalam hidupku.
3. Untuk adekku Nurwahidah yang selalu membei semangat
4. Untuk sahabat saya dari kecil Aulya Azizah dan sahabat saya dari SMA Rifdatul Anisah dan teman-teman yang menamini akhir-akhir ini, terimakasih sudah mau dijadikan tempat berkeluh kesah dan memotivasi saya selama mengerjakan skripsi ini.
5. Untuk teman-teman dan Sahabat saya seperjuangan Kelas Administrasi Punlik (b) yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan di Universitas Bhayangkara ini. Untuk teman saya di perantauan Ferra, Amara, Defanni, Fauziah, Adinda dan Anisa umiyana. Terimakasih atas dukungan dan pertemanan yang terjalin. Semoga silaturahmi tidak pernah putus sampai kita tua nanti.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur senantiasa saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT, oleh karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Dan demikian pula tidak lupa kita kirimkan salam serta sholawat kepada baginda rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh dan panutan bagi kita semua. Dengan segala nikmat dan keyainan ini Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI SEDATIGEDE SIDOARJO”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.

Pada lembaran ini tidak lupa Penulis menghanturkan Terima Kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dra. Anton Setiadji, SH, MH Selaku Rektor Universitas bhayangkara surabaya
2. Dra. Tri Prasetijowati Dekan Fakulats Ilmu sosial dan Politik
3. Bagus Ananda K, S AP., M.AP. Selaku Ketua Program Studi
4. Drs. Heru Irianto M.si Selaku Dosen Pembimbing I
5. Dr. Susi Rahmawati, S.Sos.,MM Sealuk Dosen Pembimbing II
6. Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Publik yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmu.
7. Balai desa Sedatigede yang telah membantu untuk mengijinkan saya meneliti

8. Kepada kedua orang tua yang saya sayangi, terimakasih atas usaha dan doa-doa yang tidak pernah henti dipanjatkan. Terimakasih sudah memberi dukungan yang sangat luar biasa, baik secara materi ataupun kasih sayang.
9. Untuk teman saya di perantauan Ferra, Amara, Defanni, Fauziah, Adinda dan Anisa umiyana. Terimakasih atas dukungan dan pertemanan yang terjalin. Semoga silaturahmi tidak pernah putus sampai kita tua nanti.

Dan penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan ataupun saran yang sifatnya membangun untuk kearah yang jauh lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya

Penulis

ABSTRAK

Indriani, 2023, Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Sedatigede Sidoarjo, Skripsi, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Bhayangkara Surabaya.

iiindriani937@gmail.com

Skripsi ini berjudul “**Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Sedatigede Sidoarjo**”. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerimaan dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Desa Sedatigede Sidoarjo. Kedua untuk mengetahui bagaimana dampak dana bantuan langsung tunai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Desa Sedatigede Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi penerimaan dana bantuan langsung tunai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Desa Sedatigede Sidoarjo adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan mengavaluasi penerima dana bantuan langsung tunai dapat melancarkan setiap bulannya, agar penyaluran dana juga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Dampak dana bantuan langsung tunai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Desa Sedatigede Sidoarjo belum memiliki dampak pada masyarakat karena dana tersebut tidak dicairkan disetiap bulannya dan dana bantuan langsung tunai terbilang sedikit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu pada Desa Sedatigede Sidoarjo.

Kata kunci: Evaluasi BLT-DD untuk kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

Indriani, 2023, Evaluation of village direct cash assistance (BLT-DD) in Sedatigede Sidoarjo, Thesis, Department of Public Administration, Bhayangkara University, Surabaya.

liindriani937@gmail.com

This thesis is entitled “**Evaluation of village direct cash assistance (BLT-DD) in Sedatigede Sidoarjo**”. This study aims first, to find out how to evaluate the receipt of direct cash assistance (BLT) funds to improve the welfare of the underprivileged in Sedatigede Village, Sidoarjo. The second is to find out the impact of direct cash assistance funds on improving the welfare of the underprivileged in Sedatigede Village, Sidoarjo. This study uses qualitative research methods, the data sources used are primary data sources obtained from interviews and documentation. The results of this study indicate that evaluating the receipt of cash direct assistance funds to improve the welfare of the underprivileged in Sedatigede Sidoarjo Village is a very important thing to do because evaluating recipients of direct cash assistance funds can be smoothed every month, so that the distribution of funds can also run well without there are obstacles. The impact of direct cash assistance funds for increasing the welfare of the underprivileged in Sedatigede Village, Sidoarjo has not yet had an impact on the community because the funds are not disbursed every month and the direct cash assistance funds are relatively small to improve the welfare of the underprivileged in Sedatigede Sidoarjo Village.

Keywords: Evaluation BLT-DD for community welfare

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR KEASLIAN PENELITIAN | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRCKT..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Definis Konsep..... | 9 |
| 1.6 Metode Penelitian | 10 |
| 1.6.1 Lokasi Penelitian..... | 10 |
| 1.6.2 Subjek Penelitian | 10 |
| 1.6.3 Fokus Penelitian..... | 11 |
| 1.6.4 Sumber Informasi..... | 14 |
| 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 1.6.6 Teknik Analisis Data | 16 |
| 1.6.7 Langkah-Langkah Penelitian | 16 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 18 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 18 |
| 2.2 Kerangka Konseptual..... | 26 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3 Landasan Teori | 27 |
| 2.3.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan BLT-DD | 27 |
| 2.3.2 Mekanisme Penyaluran Pelaksanaan BLT-DD | 29 |
| 2.3.3 Faktor Penghambat Atau Pendukung Dalam Pelaksanaan BLT-DD.. | 32 |
| 2.3.4 Upaya Dalam Pelaksanaan BLT-DD..... | 33 |
| BAB III GAMBARAN UMUM | 35 |
| 3.1 Ruang Lingkup..... | 35 |
| 3.2 Organisasi Pemerintah Daerah..... | 35 |
| 3.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak | 37 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN..... | 43 |
| 4.1 Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | 44 |
| 4.2 Faktor Penghambat atau Pendukung Dalam Penerimaan BLT-DD | 64 |
| 4.3 Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan BLT-DD DI Desa Sedatigede Sidoarjo | 67 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 82 |
| 5.1 Kesimpulan | 82 |
| 5.2 Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |

Daftar Tabel

| | |
|-------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 20 |
|-------------------------------------|----|

Daftar Gambar

| | |
|---------------------------------|----|
| 1.1 Logo BLT-Dana Desa | 7 |
| 2.1 kerangka Konseptual..... | 26 |
| 4.1 Besaran BLT-Dana Desa | 55 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1. Pedoman Wawancara..... | 86 |
| Lampiran 2. Surat Izin Penelitian | 90 |
| Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian..... | 91 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi, salah satu bentuk yang diberikan pemerintah yaitu bantuan langsung yang diberikan berupa uang tunai ke rekening masing-masing penerima bantuan. BLT adalah suatu pemberian yang diprogramkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan adanya bantuan langsung tunai yang telah dilakukan pemerintah untuk masyarakat miskin diharapkan dapat mengurangi beban hidup serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pembagian BLT yang dilakukan oleh pemerintah ini perlu dikelola sesuai dengan prosedur yang ada guna tercapainya suatu pemerataan penerima bantuan langsung tunai tersebut. Dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai prosedur maka pemberian bantuan langsung tunai dapat tepat sasaran dan sesuai dengan nominal yang ditetapkan oleh pemerintah. Nominal yang diberikan pemerintah untuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai ini Sebesar (Rp.300.000).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ditimbulkan oleh adanya ketimpangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi suatu negara, diantara pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan persoalan besar bagi banyak negara di dunia untuk terus meningkatkan pembangunan ekonominya agar tidak

semakin terpuruk dalam perkembangan zaman yang kian mengalami perubahan.

Dana bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kata lain program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial, makanya diberikan berbagai bantuan seperti bantuan dana kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin. Pemberian dana kompensasi diupayakan merata di tiap kabupaten berdasarkan kepada kriteria yang diberikan oleh Departement Komunikasi dan Informatika.

Kepala desa bertanggung jawab untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial. Kepala desa bertanggung jawab atas pengurusan administrasi dan urusan desa lainnya, merumuskan peraturan perundang-undangan desa, menangani urusan pertanahan, memajukan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berupaya dengan baik dalam perlindungan masyarakat, pengaturan kependudukan dan pengaturan struktur masyarakat daerah. Kelurahan memiliki hak administratif yang lebih terbatas atas wilayahnya sendiri, yang dapat mengubah status desa menjadi kelurahan.

Namun sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian atau karyawan. Setiap desa memiliki anggaran

untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di tingkat desa yang disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Bantuan tersebut di peruntukan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu di wilayah desa tersebut. Warga atau masyarakat yang layak menjadi Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat kurang mampu dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kehilangan mata pencaharian atau pekerja harian, karyawan swasta, dan pedagang yang sangat merasakan adanya penurunan pendapatan.

Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa, maka pemerintah mengalokasikan dana desa agar bisa membantu perputaran ekonomi dan membantu kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat tingkat desa di desa Sedatigede Sidoarjo. Dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Penyaluran bantuan dengan menggunakan dana desa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berada di wilayah desa. Pengalokasian dana yang diterima harus digunakan dengan cara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi yang jelas berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan. Seluruh laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2018, pemerintah meningkatkan investasi dana di tingkat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan penyaluran di desa-desa. Ada banyak masalah di desa, dan semuanya diselesaikan sedikit demi

sedikit, dan pembagian dana juga adil. Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengarahkan dana ke desa. Awalnya, dana desa hanya disarankan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, serta pelayanan fasilitas umum yang akan lebih baik dari sebelumnya. Pada desa dengan perkembangan masyarakat yang lebih baik, pengalokasian dan alokasi dana lebih difokuskan pada sistem pemberdayaan dan pengembangan ekonomi desa, serta bantuan kepada masyarakat miskin. Penelitian yang menganalisis efektivitas bantuan tunai bagi masyarakat miskin dan rentan penting untuk dipahami oleh masyarakat.

Peraturan Pemerintah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dapat menjadi sarana baru dalam upaya meminimalisir dampak ekonomi di desa. Dalam interpretasi umum peraturan tersebut, "diprioritaskan dalam penggunaan dana desa" berarti bahwa dana desa dapat digunakan untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.

Namun, terdapat beberapa hambatan dalam penyaluran BLT di pemerintah daerah, antara lain :

1. Data penerima bantuan: Masih ada situasi di mana data penerima bantuan antara satu program bantuan dengan program bantuan lainnya saling tumpang tindih. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam menentukan dengan pasti siapa yang benar-benar memenuhi kriteria penerima.

2. Pengumpul data lupa memasukkan data terbaru: Ada kemungkinan bahwa petugas yang bertugas mengumpulkan data, seperti RT atau RW, lupa untuk memperbarui data terbaru atau masyarakat sendiri tidak melaporkan perubahan data kepada mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dan ketidaksempurnaan dalam data penerima.
3. Kesadaran masyarakat tentang peralihan tingkat ekonomi keluarga: Masyarakat mungkin kurang menyadari perubahan dalam tingkat ekonomi keluarga mereka sendiri. Perubahan tersebut dapat membuat mereka terlewatkan dalam penentuan kelayakan menerima bantuan atau mempengaruhi jenis bantuan yang mereka terima.
4. Kurangnya pemahaman tentang jenis dan standar bantuan sosial: Masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami jenis dan standar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Karena banyaknya jenis bantuan yang tersedia, ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan jika mereka merasa mereka menghadapi kesulitan yang sama dengan tetangga mereka, tetapi menerima bantuan yang berbeda.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting untuk meningkatkan koordinasi antara program bantuan sosial yang

ada dan memperbaiki manajemen data penerima. Sosialisasi yang efektif juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan dan jenis bantuan yang tersedia. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat dan koordinasi yang baik, diharapkan penyaluran BLT dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada proses pendataan, desa harus berpedoman pada dua sumber. Sumber pertama yaitu Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang menetapkan tiga kriteria penetapan sasaran. Sumber kedua yaitu Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 yang memuat 14 kriteria. 14 kriteria tersebut mirip dengan kriteria rumah tangga miskin (RTM) dari Kementerian Sosial. Pihak desa mengalami kesulitan untuk menemukan keluarga dengan 14 kriteria tersebut. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada kebaharuan isu yang dibahas, yaitu kebijakan BLT-DD yang merupakan kebijakan yang baru diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dari sisi kedalaman dan keragaman aspek yang digali pada satu objek. Penelitian terdahulu terkait implementasi BLT banyak memusatkan pembahasan di salah satu isu berikut: mekanisme, ketepatan penyaluran, atau permasalahan. Sedangkan penelitian ini membahas 3 (tiga) tujuan sekaligus yaitu mekanisme, ketepatan, serta permasalahan yang dihadapi pemerintah desa. Selain itu, objek pada penelitian ini belum menjadi objek pada penelitian

serupa sehingga menghasilkan novelty berupa kasus ketepatan dan permasalahan baru.



Gambar 1.1 Logo BLT-Dana Desa

Sumber:

https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=Awrgws3XNtdkK_EWNYRXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZANMT0NVSTEWmKnfMQRzZWMDcGl2cw--?p=logo+BLT+DANA+DESA&fr2=piv-web&type=E211US885G0&fr=mcafee#id=0&iurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FN-1AFNLTrPk%2Fhqdefault.jpg&action=click

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Sedatigede ?
2. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Bantan Langsung Dana Desa di Sedatigede ?
3. Bagaimana Evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Dana Desa di Sedatigede ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Sedatigede
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Bantuan Langsung Dana Desa di Sedatigede
3. Untuk mengetahui Bagaimana Evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Dana Desa di Sedatigede ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi peneliti, bagi akademik, bagi pemerintah desa dan juga bagi masyarakat. Maka dari itu dengan adanya penelitian maka suatu permasalahan akan terselesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini, penulis berharap akan memberikan wawasan dan juga manfaat kepada semua orang.

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai bahan rujukan untuk menjadi referensi dalam sebuah penelitian dan juga sebagai bahan pembelajaran untuk peneliti

2. Bagi Akademik

Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan mahasiswa dan juga dosen sebagai bahan acuan dalam pembelajaran. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

3. Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD).

4. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD).

5. Manfaat bagi Universitas Bhayangkara Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan pembaca, juga sebagai referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya dengan tema yang serupa terutama dalam upaya mengevaluasi pelaksanaan bantuan beras miskin di Sidoarjo.

1.5 Definisi Konsep

1. Woodruff mendefinisikan konsep sebagai adalah suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkret, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis

sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu.

2. Soedjadi mendefinisikan konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk menagadakan klasifikasi atau penggolongan yang apad umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangakaian kata.
3. Bahri menjelaskan konsep adalah satuan ahli yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama.

Jadi dapat dikatakan bahwa Pengertian Konsep sendiri adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap extensinya. Konsep juga dapat diartikan pembawa arti.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penelitian dilakukan dikantor Desa Sedati Gede dikarena lebih dekat dengan tinggal, dan mudah dijangkau.

1.6.2 Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang dianggap memiliki kompetensi terkait kajian yang akan diteliti dalam penelitian,

karena sebagai subjek mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang menjadi pokok kajian penelitian. Berdasarkan pemaparan tersebut, narasumber atau informan yang akan digunakan dalam penelitian terkait Pelaksanaan Bantuan Beras Miskin Desa Sedati Gede.

1.6.3 Fokus penelitian

Fokus Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Sedatigede Sdioarjo.

Berdasarkan Fokus penelitian ini peneliti menggunakan 5 indikator sebagai berikut. William Dunn (2018:650) Menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas

Yang dimaksud efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang di inginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai- nilai yang di inginkan sampai kepada publik. Agar masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat di atasi dengan baik.

2. Efisiensi

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menentukan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Untuk efisiensi kebijakan tersebut dapat diukur menjadi tiga indikator : Dari segi biaya, dari segi waktu, dan dari segi tenaga.

3. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

4. Kecukupan

Kecukupan adalah merupakan alat ukur seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, mencukupkan nilai dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

5. Responsivitas

kebanyakan masyarakat Desa Sedati merespon dengan baik adanya program bantuan ini. Namun tak jarang mereka mengatakan bahwa penerima manfaat dari program ini tidak sesuai dengan kriteria yang sudah

ditepkan. Dari hasil survey yang dilakukan peneliti dilapangan memang banyak respon positif dari masyarakat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana desa salah satunya kegiatan bantuan langsung tunai.

6. Ketepatan

Ketepatan sudah merujuk pada hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai bagi kelompok sasaran yaitu masyarakat Desa Sedati. Pada ketepatan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa ini belum berjalan dengan baik ditandai dengan adanya masyarakat penerima bantuan yang tidak sesuai dengan penerima bantuan yaitu masyarakat yang memiliki fasilitas berada.

Subjek penelitian adalah pihak yang dianggap memiliki kompetensi terkait kajian yang akan diteliti dalam penelitian, karena sebagai subjek mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang menjadi pokok kajian penelitian. Berdasarkan pemaparan tersebut, narasumber atau informan yang akan digunakan dalam penelitian terkait Pelaksanaan Bantuan Beras Miskin Desa Sedati Gede.

1. pelaksanaan pendistribusian BLT-DD di kelurahan Sedati Gede kabupaten sidoarjo
2. Efektivitas Pelaksanaan BLT-DD dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kelurahan sedati Gede

1.6.4 Sumber Informasi

Sumber informasi dipilih berdasarkan purposive (purposive sampling) yang didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data bersedia memberikan data yang benar-benar relevan dan komprehensif dengan masalah masalah penelitian. Sedangkan informan selanjutnya diminta pula untuk menunjukan orang lain yang dapat memberikan informasi yang mendukung fokus penelitian. Adapun sumber informasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Sedati Gede
2. Pengurus Desa Sedati Gede
3. Masyarakat Desa

1.6.5 Teknik Pengumpulan data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karna hakikat dari penelitian adalah mencari data yang nantinya diinterpretasikan dan dianalisis dalam penelitian kebijakan

pengumpulan data diperlukan suatu teknik pengumpulan data dilapangan. Dalam pengumpulan data, terdapat tiga proses kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik dalam pengumpulan data, yang mana peneliti berhadapan langsung dengan informan atau narasumber untuk mendapat informasi sesuai dengan judul penelitian ini.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (moelong 2017:186).

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengamati dan mempelajari data-data yang bersifat dokumentatif. Hasil dari catatan tersebut penulis beberapa kali mencatat hasil wawancara dan mencatat dokumen milik Kantor Desa Sedatgede Sidoarjo.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses akhir dalam penelitian untuk melakukan olah data dan mendapatkan hasil kesimpulan dari peneliti yang dilakukan Menurut Sugiyono (2007:337). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel.

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2007:337) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu : data reduction, data display, data collection dan conclusion drawing.

1.6.7 Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melalui proses atau langkah-langkah agar penelitian menjadi terstruktur dan bisa berjalan dengan baik

1. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui para tokoh/key informan. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum. Pada tahap

berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan studi dokumentasi dan observasi.

2. Diskusi

Dalam rangka lebih menangkap ide-ide yang dikemukakan para responden/yang diwawancarai, peneliti juga akan melakukan diskusi secara terus-menerus dengan responden yang berada di lapangan. Diskusi ini sifatnya berkelanjutan, selama terjun ke lapangan dan selama penulisan. Ini dilakukan juga untuk melakukan triangulasi data.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk menambah atau memperkuat apa yang terjadi, dan sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan hasil wawancara, sejauh ada dokumentasi yang bisa diperoleh di lapangan.

4. Observasi langsung

Observasi dilakukan pertama pada seluruh aktivitas yang menjadi fokus masalah peneliti. Kemudian setelah observasi yang bersifat keseluruhan ini diperoleh data-data yang bersifat umum maka peneliti akan lebih memfokuskan observasi pada kegiatan-kegiatan yang langsung terkait dengan fokus penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Menghubungkan desa dan kecamatan desa sebagai pengantar dalam setiap administrasi kependudukan tidak boleh dipungkiri dan benar harus dilakukan. Para pejabat pemerintah desa selalu memberikan kemudahan dalam menghubungkan masyarakat baik disabilitas maupun masyarakat yang mampu secara fisik. Masalah ini diatasi dengan datangnya langsung aparat pemerintah desa kerumah tempat tinggal masyarakat dan mengumpulkan data yang dimiliki dan mengurus langsung kelengkapan dokumen yang tidak sesuai ini kepada pihak dinas kependudukan. Kejadian mendadak seperti melahirkan dan kematian sering tidak dilaporkan karena kendala secara ekonomi terutama bagi masyarakat penerima bantuan. Kebijakan yang diambil pemerintah desa sangat konkrue dengan keadaan ekonomi penduduk jangan sampai mengabaikan administrasi kependudukan sebelum terjadi akibat panjang dibelakang hari.

Dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi para penerima bantuan pemerintah desa menerima masukan dan bila ada kegiatan yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil didesa, pagi pukul 08.00 setiap hari jumat para kepala dusun datang kelingkungan warga dengan menghimbau para penduduk untuk melengkapi dokumen kependudukan dengan berkeling disetiap dusun masing-masing. Setiap hari para aparat pemerintahan desa melakukan hal ini dengan tujuan percepatan dan masalah yang sering muncul mengenai administrasi dari dasar berupa administrasi pelayanan kependudukan bisa dikurangi 68 dengan capaian pelayanan kita sama ratakan. Pengaruh besar pada pengurusan administrasi kependudukan kepada masyarakat penerima bantuan memberikan pedoman teknis dan bantuan percepatan pergerakan masyarakat.

Aturan yang kami berikan dengan regulasi agar masyarakat tidak bingung dalam pergerakan yang dilakukan desa dengan tujuan ada syarat yang harus dipenuhi perorangan bagi penerima bantuan. Pedoman dengan alur masing-masing sering berubah sebagaimana dikatakan kepala desa. Pengembangan pola aturan jika dibiarkan berkembang didesa masyarakat akan kebingungan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pemenuhan administrasi kependudukannya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|-----|---|--|--|
| 1. | Andi Rahmat Nizar Hidayat (2021) Skripsi Peran Pemerintah daerah Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan Covid-19 di Desa Tappale Libureng Kabupaten Bone | Hasil Penelitian menemukan Bahwa (1) Peran pemerintah daerah sebagai regulator di DesaTappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah. Pemerintah Desa Tappalemenerbitkan Keputusan Kepala Desa Tappale Nomor 14 Tahun 2020 dan mengeluarkanSurat Keterangan pembentukan Relawan Desa COVID19. (2) Peran pemerintah daerahsebagai dinamisator di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalahPemerintah Desa Tappale | Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi yang akan diteliti, terdapat perbedaan dalam kondisi penelitian serupa permasalahan di wilayah tersebut. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>mengundang tokoh masyarakat untuk ikut dalam Musdesus untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. (3)</p> <p>Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah Pemerintah Desa Tappale mengundang tokoh masyarakat untuk ikut dalam Musdesus untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. (4)</p> <p>dana aspek yang mempengaruhi keberhasilan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | <p>penanganan COVID-19 di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone meliputi sosialisasi kebijakan, penentuan sasaran penerima program dan koordinasi dalam pelaksanaan.</p> | |
| 2. | <p>Dita Nurfadillah (2020) Skripsi Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima</p> | <p>Menemukan bahwa evaluasi kinerja pemerintah desa dalam pelayanan bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, belum optimal karena adanya keluhan-keluhan mengenai pendataan nama-nama calon penerima BLT Desa. Namun kendala yang dihadapi adalah miskomunikasi antara Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat.</p> | <p>Perbedaan penelitian ini dapat dilihat dari kurangnya pengoptimalan dalam pendataan nama-nama calon penerima BLT DD</p> |

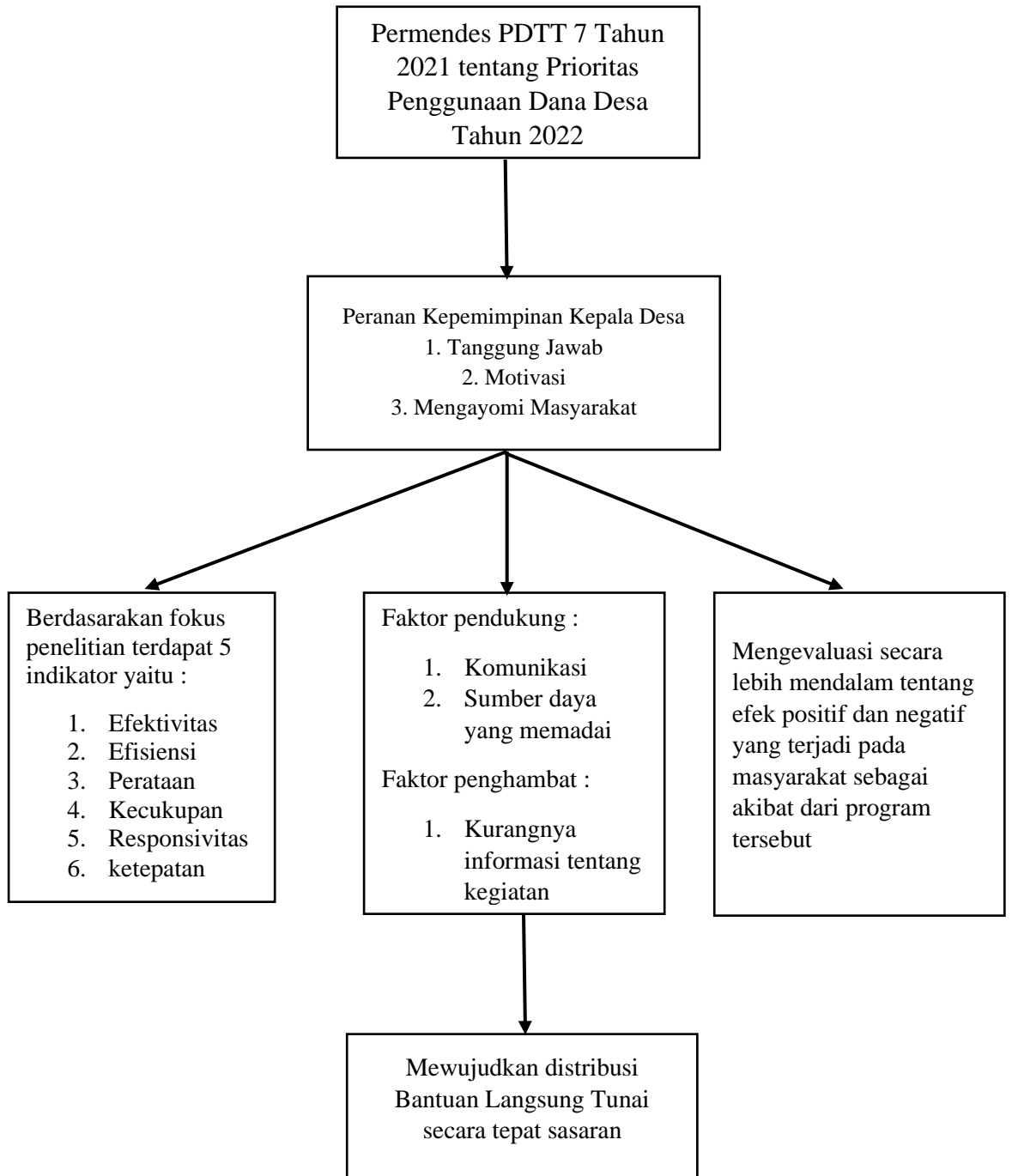
| | | | |
|----|--|--|---|
| 3. | <p>Chofifah Nur Azizi, Dkk (2021) Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Muntang Kabupaten Purbalingga</p> | <p>Menemukan bahwa tingkat responsivitas Kepala Desa masih rendah karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi bencana yang multikompleks, Namun demikian Kepala Desa dan perangkat lainnya bertanggungjawab terhadap keberhasilan dalam penanganan Covid19 di Desa dengan bertanggungjawab penuh dalam menangani warga desa yang berdampak pandemi.</p> | <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada responsivitas kepala desa, dimana kepala desa disini bertolak belakang dalam mengoptimalkan penanganan BLT DD</p> |
| 4 | <p>Burhanuddin, 2020. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga</p> | <p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Komunikasi yaitu Sosialisasi Program BLT dimana tingkat keberhasilan dan informasi sudah dipaling rendah dari sasaran tersebut,</p> | <p>Perbedaannya terdapat pada kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh kepala desa</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | Kecamatan PotoTano Kabupaten Sumbawa Barat | yaitu penerima BLT, Sumber Daya dimana tingkat pendidikan staf desa Tua Nanga belum baik, Struktur Birokrasi dalam pencairan BLT berhasilnya implementasi pelaksanaan pencairan BLT di Kabupaten Sumbawa Barat berhasil atau tidaknya tergantung pada komitmen dan kemampuan pelaksanaannya | kepada masyarakat |
| 5 | Auliana Sari, 2021 Implementasi Permendesa PDTT No.6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Pengguna Dana Desa” (Pelaksanaan BLT Di Desa | Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi penyaluran program bantuan langsung tunai di desa Talang Duku sudah dilaksanakan akan tetapi masih belum sesuai, karena efektifitas yang tidak berjalan terhadap | Perbedaan dalam penelitian ini tidak banyak, hanya saja terdapat belum adanya kesesuaian dalam pelaksanaan |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| | Talang Duku Kec.Taman Rajo Kab. Muaro Jambi) | penerima bantuan program (BLT) | |
|--|---|-----------------------------------|--|

2.2 Kerangka Konseptua

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 Landasan Teori

2.3.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Peran pemerintah di daerah sebagaimana dikemukakan menurut arif (2012: 69) ada 4, yaitu pemerintah desa sebagai fasilitator, mobilisator, regulator, dan motivator. Dasar indikator peran ini dapat dilakukan dalam melihat bagaimana peran-peran pemerintahan desa mampu membantu dan memenuhi administrasi kependudukan bagi masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa.

Program yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa untuk peningkatan dokumen kependudukan dan memfasilitasi masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa merupakan langkah yang positif dalam meningkatkan pelayanan administrasi di tingkat desa. Beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi dari pernyataan Anda adalah:

1. Memberikan keluasan berpikir tanpa tuntutan: Dengan memberikan keluasan berpikir, para pemerintah desa menunjukkan sikap terbuka dan ramah dalam membantu masyarakat. Ini menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat merasa nyaman untuk memperoleh informasi dan mendapatkan bantuan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Ketika tidak ada tuntutan yang

memberatkan, masyarakat lebih mungkin untuk mengajukan pertanyaan dan mencari bantuan tanpa rasa takut atau khawatir.

2. Dorongan kuat dari pemerintah desa: Dorongan kuat dari pemerintah desa menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan yang baik dan membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. Ini penting untuk menciptakan kesadaran dan memotivasi masyarakat agar lebih aktif dalam memperoleh dokumen kependudukan yang diperlukan.
3. Mendorong meratanya bantuan dan pembangunan berbasis desa: Melalui program ini, pemerintah desa tidak hanya berfokus pada peningkatan administrasi kependudukan, tetapi juga pada pembangunan berbasis desa secara umum. Dengan meratanya bantuan dan pembangunan, pemerintah desa berusaha untuk memastikan bahwa manfaat dana desa dan bantuan lainnya didistribusikan secara adil dan merata di antara masyarakat desa.
4. Meningkatkan kepedulian masyarakat: Program ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli dan proaktif dalam mengurus administrasi kependudukan mereka sendiri. Dengan memanfaatkan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi, masyarakat diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap dokumen kependudukan yang diperlukan.

Dalam keseluruhan, program yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat membantu masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai dana Desa dalam memperoleh dan memenuhi persyaratan administrasi kependudukan. Dorongan yang kuat dari pemerintah desa serta peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dapat berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan administrasi yang lebih baik dan peningkatan pelayanan di tingkat desa.

2.3.2 Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Ketentuan Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah diatur dalam Instruksi mendagri nomor 3 tahun 2020. Dalam instruksi tersebut, dijelaskan Ketentuan dalam pelaksanaan BLT dalam Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

1. BLT dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01;

3. Penentuan kriteria dan mekanisme penetapan target penerima BLT, mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan waktu pemberian, dan besaran nominal BLT yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Penyaluran BLT dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer- antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah/cashless) ke penerima BLT, yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai pertimbangan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan mekanisme penyaluran BLT kepada penerima, berikut penjelasannya:

Penyalur BLT secara tunai

- Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan hand sanitizer.

- Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi sebagaimana contoh pada huruf Q lampiran ini.

Penyaluran BLT secara non tunai melalui transfer Bank,

- Untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima bantuan.
- Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tranfer antar rekening.
- Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT.

2.3.3 Faktor Penghambat atau Pendukung Dalam Pelaksanaa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Faktor pendukung itu pun kami pihak desa hanya menggunakan data dari masing-masing pihak RT dan adapun data penerima dari pihak-pihak RT tersebut akan dirapatkan kembali yaitu MUSDES (Musyawarah desa) yang nantinya hasil rapat tersebut akan menentukan siapa saja yang berhak untuk menerima bantuan ini dan sesuai dengan RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga pembagian bantuan di desa kersik Putih ini transparan dan tidak ada kesalah pahaman dengan pihak lain karna dengan adanya MUSDES ini keputusan yang diambil ada lah keputusan bersama.

Faktor penghambat proses bantuan sosial berupa BLT ini pun mempunyai permasalahan berupa adanya masyarakat yang sering complain karena merasa dirinya tidak mendapatkan bantuan, sedangkan pihak desa pun melihat kondisi dilapangan warga yang complain atas bantuan ini apakah mereka benar-benar membutuhkan atau masih dengan kategori mampu. oleh karena itu pihak desa akan memberikan penjelasan dan alasan dan bukti kreteria penerima yang semestinya, dan sebagian besar pula masyarakat yang sudah di jelaskan oleh pihak desa masih

tidak terima dengan apa alasan yang telah di sampaikan oleh pihak desa.

2.3.4 Upaya Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai

Dana Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, pola pendekatan yang bersifat proyek pembangunan digantikan oleh pembangunan yang partisipatif. Partisipatif masyarakat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam rangkaian Bntuna Pelaksanaan Tunai Dana Desa, mulai dari perencanaan pelaksanaan, penilaian dan perolehan hasil. Keterlibatan masyarakat dalam rangkaian kegiatan tersebut di nyatakan dalam bentuk perhatian, keikutsertaan dalam kelompok pendistribusian serta dalam pengawasan atau memonitoring pelaksanaan kegiatan proyek. Keterlibatan pemerintah yang hanya sebatas memantau dan memberikan legilitas semakin membyka peluang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri dan menggali potensi dan partisipasinya. Minimnya keterlibatan pemerintah ini secara implisit menunjukkan adanya dukungan dan keberpihakan terhadap proses pemberdayaan, dimana pemerintah hanya bersifat sebagai katalis atau penyedia fasilitas

yang diperlukan bagi proses pemberdayaan dalam komunitas pemberdayaan.

1. Kegiatan yang dilaksanakan harus terarah/menguntungkan masyarakat yang tertinggal.
2. Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang akan dilakukan.
3. Karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri, upaya pemberdayaan masyarakat harus berkaitan dengan pengembangan kegiatan usaha bersama (kooperatif) dalam kelompok yang dapat dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal, dan terakhir, menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial.

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di kota Sidoarjo menunjukkan suatu pendekatan yang intensif dan komprehensif yang dilakukan baik oleh fasilitator kelurahan, kecamatan dan kota Sidoarjo serta Perguruan Tinggi, untuk menstimulir dan memotivasi keterlibatan dan peran aktif masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang diatur dalam peraturan Desa ini meliputi ;

- a. Organisasi Pemrintah Desa
- b. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak
- c. Tata Kerja, dan
- d. Pembinaan Perangkat Desa.

3.2 Organisasi Pemerintah Desa

Bagian Kesatu Pemerintahan Desa

1. Penyelenggara Pemerintah Desa dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Desa yaitu Pemerintah Desa yang terjadi kepala Desa dan perangkat Desa.
2. Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.
3. Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh :
 1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
 2. Kepala Urusan Keuangan, dan
 3. Kepala Urusan Perencanaan.

- a. Pelaksanaan Kewilayahan, yaitu Kepala Dusun yang wilayah kerjanya pada dusun yang bersangkutan.
 - b. Pelaksanaan Teknis, yaitu kepala Seksi yang terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan, dan
 3. Kepala Seksi Pelayanan.
1. Kepala Desa dapat mengangkat staf untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi kepala Urusan dan Kepala Seksi.
 2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab Kepala Desa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa dibantu 3 (tiga) unsur
 1. Kepala Urusan tata Usaha dan Umum
 2. Kepala Urusan Keuangan
 3. Kepala Urusan Perencanaan
- c. Pelaksanaan Teknis
 1. Kepala Seksi Pemerintahan
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan
 3. Kepala Seksi Pelayanan
- d. Kepala Dusun 3 (tiga)) Orang
 1. Kepala Dusun Sedatigede

2. Kepala Dusun Gabung
3. Kepala Dusun Bono

3.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan tugas Kepala desa memiliki fungsi :

- a) Menyelenggarakan Pemerinth Desa, seperti tata pemerintah desa, penetapan peraturan di desa, pembinanaan pertanahan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban di esa, melakukan upaya perlindungan masyrakat desa, administrasi kependudukan desa dan, seperi tata pemerintahan desa, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat desa, administrasi kependudukan desa dan, penataan dan pengelolaan wilayah desa.
- b) Melaksanakan pembangunan di desa, seperti pembangunan saranan prasaranan perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

- c) Pembinaan kemasyarakatan desa, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, keagamaan dan ketenaga kerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat desa, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang tarua, dan
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala desa mempunyai wewenang

:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c) Melaksanakan pembinaan perangkat desa
- d) Mengalihkan tugas atau rotasi jabatan perangkat desa yang berkedudukan setara
- e) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- f) Menetapkan peraturan desa
- g) Menetapkan peraturan kepala desa dan / atau peraturan bersama kepala desa
- h) Menetapkan rencana pembangunan jangka menengah desa
- i) Menetapkan rencana kerja pemerintah desa
- j) Menetapkan APBDesa
- k) Membina kehidupan masyarakat desa

- l) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- m) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- n) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- o) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- p) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- q) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- r) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- s) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- t) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai kewajiban :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d) Menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan

- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik
- i) Mengelola keuangan dan aset desa
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa

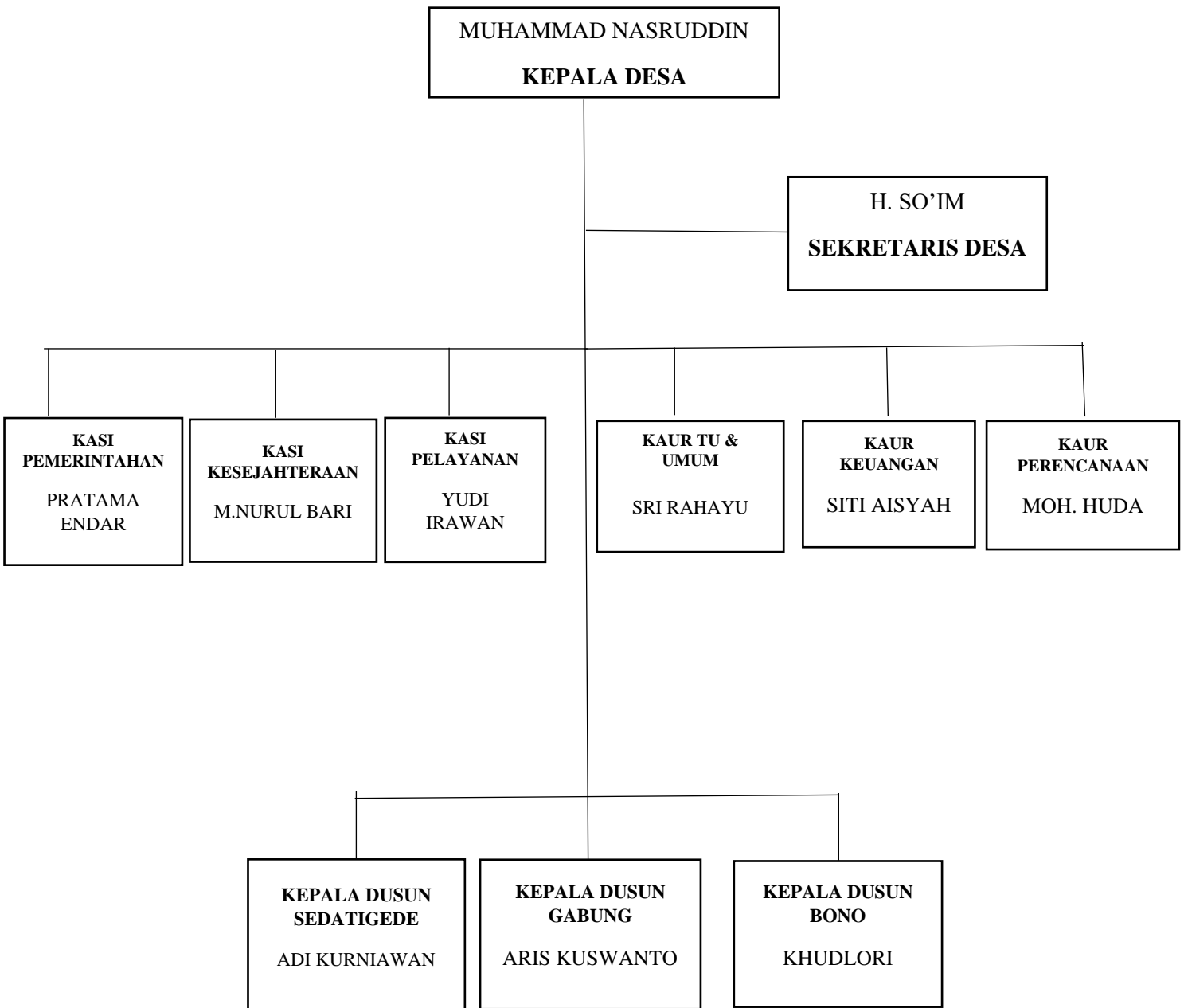
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai hak :

- a) Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa setelah mendapatkan persetujuan bupati
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan

- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa wajib :

- a) Menyampaikan laporan penyelemggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati
- b) Menyampaiakan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati
- c) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggran, dan
- d) Memberikan dana / atau mnenyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintaha desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggran

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SEDATI GEDE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini berupa deskripsi mengenai Evaluasi Kebijakan pelaksanaan BLT-DD di Sedatigede Sidoarjo. Kepala desa bertanggung jawab untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial. Kepala desa bertanggung jawab atas pengurusan administrasi dan urusan desa lainnya, merumuskan peraturan perundang-undangan desa, menangani urusan pertanahan, memajukan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berupaya dengan baik dalam perlindungan masyarakat, pengaturan kependudukan dan pengaturan struktur masyarakat daerah. Kelurahan memiliki hak administratif yang lebih terbatas atas wilayahnya sendiri, yang dapat mengubah status desa menjadi kelurahan.

Pada bab ini, dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi temuan di lapangan, diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan studi Wawancara, Observasi, Dokumentasi yang diambil secara tidak struktur dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan. Dilakukan dengan menggunakan indikator Evaluasi William N.Dunn.

Pada Program BLT DD, masih ditemukan permasalahan dalam program ini yaitu ketidaksesuaian ekspektasi kebijakan pemerintah yang jelas tertulis bahwa bantuan ini diberikan tepat waktu selama 2 tahap dan masing-masing tahap dibagi menjadi 3 bulan atau 3 kali menerima bantuan, maka dari itu sesuai dengan teori Dunn tahun 2003 bahwa mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik

diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Berikut kriteria yang dijabarkan oleh Dunn yaitu:efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

4.1 Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Sedatigede Sidoarjo

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan BLT-DD bagi masyarakat di sedatigede Sidoarjo dilihat dari beberapa indikator Evaluasi, yaitu: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsibilitas, dan Responsibilitas. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menguraikan dari masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Efektifitas

Itu sangat menggembirakan mendengar bahwa program BLT-DD yang dijalankan di Desa Lansot telah mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah Desa. Program tersebut memang dirancang untuk mensejahterakan masyarakat Desa Sedatigede, khususnya masyarakat yang kurang mampu, serta untuk mendukung perekonomian Desa.

Semoga program BLT-DD di Desa Sedatigede terus berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka.

Pemerintah Desa telah melakukan beberapa cara agar supaya program BLT-DD ini bisa efektif salah satunya yaitu melakukan

transparansi dalam penyaluran dana dan transparansi dalam pendataan atau perekrutan calon penerima BLT di Desa Sedatigede. Selain itu pemerintah juga melakukan sosialisasi tentang program BLT-DD agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi tujuan dari diadakannya program BLT-DD di Desa Sedatigede.

Pelaksanaan BLT-DD bagi masyarakat Sedatigede Sidoarjo, yaitu seberapa efektifnya pelaksanaan yang dilakukan. Dari teori tersebut menimbulkan variable pertanyaan tentang Apakah BLT-DD ini sudah mampu mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan dan bisa dikatakan efektif bagi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H.So'im selaku sekretaris Desa Sedatigede, beliau mengatakan bahwa:

“Berbicara masalah efektifitas pelaksanaan secara umum sudah dilaksanakan se Efektif mungkin, dari 118 turun menjadi 64 itu yang sudah benar-benar maksimal dan di data oleh pemerintah untuk yang benar-benar mendapatkan bantuan langsung tunai, itu sudah kami lakukan atas perintah pemerintah”.
(Hasil wawancara 06, juni 2023)

Berdasarkan hasil jawaban indikator efektifitas dalam penyaluran BLT-DD sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Sedatigede apakah program BLT-DD yang dikeluarkan oleh pemerintah berdampak positif bagi masyarakat, sekarang ini. berdasarkan hasil wawancara dengan warga Sedatigede ibu sunarti, beliau mengatakan bahwa :

“Dengan adanya Bantuan Tunai Langsung ini memberi pengaruh positif, dan masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya program ini, kami sebagai masyarakat yang kurang mampu dengan adanya program ini bisa sedikit membantu kami”

(Hasil wawancara 09, juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak desa dan warga sedatigede menurut saya pelaksanaan bantuan tunai Langsung di Desa Sedatigede Sidoarjo sudah efektif dan memberi pengaruh positif terhadap warga Sedatigede.

2. Efisiensi

Pada tahap pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat Sedatigede Sidoarjo, yaitu seberapa efisiensi penyaluran yang dilakukan. Dari teori tersebut terdapat pertanyaan tentang bagaimana staff dalam menjalankan kebijakan ini, apa sudah sesuai dengan prosedur atau sudah sesuai dengan harapan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H.So'im selaku sekretaris Desa Sedatigede, beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, diarahkan ke masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan Bantuan langsung Tunai. Sangat membantu sekali untuk perekonomian masyarakat”.

(Hasil wawancara 06, juni 2023)

Berdasarkan jawaban dari indikator efesiensi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat Sedatige dalam pelaksanaan pihak desa menyatakan bahwa sudah terealisasikan dengan baik dan sesuai sebagaimana mestinyayang mana BLT-DD ini merupakan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak H.So'im selaku sekretaris Desa Sedatigede (Bantuan Langsung Tunai) BLT-DD untuk masyarakat yang kurang mampu sangat terbantu walaupun secara keseluruhan bantuan tersebut tidak mencukupi, masyarakat sangat merasakan manfaat dengan adanya penyaluran BLT tersebut. Sementara itu Bapak Nasaruddin sebagai kepala desa mengatakan bahwa :

“Dimasa sekarang ini jumlah penyaluran BLT sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Jika penyaluran dapat berjalan dengan baik maka ini menjadi suatu yang sangat bermanfaat pastinya untuk masyarakat di masa saat sekarang ini”

(Hasil wawancara 06, juni 2023)

Menurut Bapak Nasaruddin diatas beliau mengatakan bahwa selama program ini berjalan sangat membantu masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi. Sementara itu menurut masyarakat Sedatigede mengatakan bahwa:

“Penyaluran BLT sudah sesuai dengan prosedur yaitu bertepatan pada perkonomian yang lagi sulit-sulitnya jadi dengan adanya BLT sangat terbantu masyarakat”

(Hasil wawancara 06, juni 2023)

Terima kasih atas informasinya mengenai program BLT di Desa Sedatigede. Dari penjelasan Anda, terlihat bahwa pemerintah Desa Sedatigede telah berhasil menjalankan program BLT-DD dengan efisien dan dengan biaya yang terjangkau. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah Desa Sedatigede, seperti upaya sosialisasi dan transparansi dalam penyaluran dana serta pendataan calon penerima, tampaknya telah memberikan hasil yang baik. Dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya program BLT-DD ini, pemerintah Desa Sedatigede telah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dari program tersebut. Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dalam menjalankan program tersebut.

Selain itu, transparansi dalam penyaluran dana dan pendataan calon penerima BLT-DD juga merupakan langkah yang positif. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat bagaimana dana tersebut digunakan dan siapa saja yang menjadi penerima manfaatnya. Hal ini dapat meminimalisir kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Sedatigede. Upaya pemerintah Desa Sedatigede untuk melakukan sosialisasi dan pendataan calon penerima BLT-DD secara langsung kepada masyarakat juga terlihat efektif. Dengan turun langsung ke masyarakat, pemerintah dapat memperoleh

informasi yang lebih akurat dan memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada yang membutuhkan.

Dengan memperbanyak aksi dan turun langsung ke masyarakat, pemerintah Desa Sedatigede dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk menjalankan program BLT-DD. Ini adalah pendekatan yang cerdas untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia dan mengalokasikannya untuk keperluan lain yang mendukung pembangunan Desa Sedatigede. Penting untuk terus mengawasi dan mengevaluasi program BLT-DD ini guna memastikan bahwa efisiensi dan transparansi tetap terjaga, serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

3. Perataan

Pada tahap peyaluran BLT-DD bagi masyarakat kurang mampu di desa Sedtige Sidoarjo, yaitu seberapa rata penyaluran yang dilakukan. Dari teori tersebut menimbulkan variable pertanyaan tentang apakah penyaluran BLT-DD ini sudah merata atau ada masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan BLT-DD ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nasaruddin sebagai kepala desa Sedatigede, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk itu menjadi kewenangan perangkat Desa yang nantinya kita serahkan kesetiap perangkat Desa yang ada”.
(Hasil wawancara 06, jini 2023)

Berdasarkan hasil jawaban dari Indikator kecukupan dalam penyaluran BLT-DD bagi masyarakat kurang mampu di desa Sedatigede Sidoarjo, dalam pelaksanaan pihak desa menyatakan bahwa pemerataan distribusi penyaluran BLT-DD sepenuhnya dilimpahkan dan menjadi kewenangan setiap perangkat Desa yang ada. Sedangkan menurut Bapak H.So'im selaku sekretaris Desa Sedatigede, beliau mengungkapkan :

“Mungkin saja sudah merata penyaluran BLTnya tapi kan memang ada kriterianya jadi pasti merata karena itu sudah terdata. Harapan penyaluran diratakan kalau memang terdata dan hanya untuk KPM biar masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan kembali bantuan pemerintah”.
(Hasil wawancara 06, juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak H.So'im selaku sekretaris Desa Sedatigede (Bantuan Langsung Tunai) BLT-DD untuk masyarakat yang kurang mampu yaitu pemerataan yang tersalurkan adalah pihak yang memang sudah terdata sejak awal atau termasuk kedalam KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Sementara itu Bapak Masnor, dan Bapak Nasaruddin mengatakan bahwa :

“Pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan dilakukan dengan baik itu pertandanya baik pemerintahan baik perangkat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan peran seperti mendata menjadi baik”.
(Hasil wawancara 06, juni 2023)

Menurut Bapak Nasaruddin apabila penyaluran BLT-DD dilaksanakan dengan baik maka pemerintah dalam menjalankan

perannya sudah baik. Menurut Ibu Isa sebagai masyarakat Sedatigede Sidoarjo yang menyatakan bahwa:

“Harapan masyarakat memang kalau dapat itu distribusi penyaluran BLTnya secara merata, tapi inikan sudah jelas katanya di peruntukan untuk masyarakat kurang mampu artinya hanya diperuntukan untuk masyarakat yang terpilih sebagai penerimanya saja jadi sudah semuanya dalam artian sudah terlaksanakan secara merata”.
(Hasil wawancara 08, juni 2023)

Menurut Ibu Isa penyaluran program ini sudah merata, hal tersebut disampaikan Ibu Isa karena melihat dan mendengar program pelaksanaan BLT-DD hanya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu saja, dan bukan sebagai masyarakat yang masih mampu, Bapak Nasarudin beliau mengatakan bahwa:

“Harapan merata karena sangat diharapkan ditengah-tengah pandemi yang serba kesulitan ini”.
(Hasil wawancara 06, juni 2023)

Bapak Nasaruddin selaku Kepala Desa Sedatigede Sidoarjo berharap banyak kepada pemerintah dalam penyaluran BLT-DD tersebut bahwa sistemnya harus jelas. Berdasarkan hasil jawaban dari masyarakat Sedatigede Sidoarjo diatas memberikan jawaban yang berbeda-beda, memberikan jawaban terkait dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan tidak berjalan dengan baik.

Terima kasih atas informasinya. Memang tidak jarang dalam implementasi program bantuan sosial seperti BLT-DD masih terjadi ketidakmerataan atau kesenjangan dalam manfaat yang diterima

oleh masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya ketepatan dalam pendataan calon penerima, keterbatasan anggaran, atau kesalahan dalam pelaksanaan distribusi bantuan. Dalam kasus Desa Sedatigede, jika ada warga yang seharusnya layak menjadi calon penerima BLT-DD namun tidak didaftarkan oleh pemerintah desa, itu bisa menjadi penyebab ketidakmerataan dalam manfaat program tersebut. Kurangnya ketepatan dalam pendataan masyarakat yang kurang mampu bisa mengakibatkan beberapa orang yang membutuhkan tidak tercakup dalam program tersebut.

Penting bagi pemerintah desa untuk melakukan pendataan secara teliti dan transparan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendataan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi dengan lebih baik siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengaduan dan pemantauan yang efektif untuk mengatasi kesalahan atau ketidakmerataan dalam penerimaan bantuan. Meskipun mayoritas masyarakat dan pemerintah desa sudah mengakui bahwa tujuan program BLT-DD telah tercapai dalam mensejahterakan masyarakat dan mendukung perekonomian Desa Sedatigede, penting untuk memperhatikan warga yang belum merasakan dampak yang signifikan. Evaluasi terus menerus perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan melakukan

perbaikan yang diperlukan agar program ini dapat lebih merata dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Dalam menghadapi situasi ini, penting juga bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan keluhan mereka kepada pemerintah desa agar perbaikan dapat dilakukan. Transparansi dan partisipasi aktif dari masyarakat serta komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan warganya dapat membantu mengatasi ketidakmerataan dan meningkatkan dampak positif dari program BLT-DD di Desa Sedatigede.

4. Kecukupan

Pada tahap pelaksanaan BLT bagi masyarakat kurang mampu di Desa Sedatigede Sidoarjo, yaitu seberapa cukup pelaksanaan yang dilakukan. Dari teori tersebut menimbulkan variable pertanyaan tentang dengan adanya BLT-DD ini apakah sudah cukup membantu dengan nominal dana yang diberikan (Rp.300.000) perbulannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nasarudin sebagai kepala desa Sedatigede sidoarjo , beliau mengatakan bahwa :

“Secara umum belum terpenuhi dengan uang tersebut tetapi dengan adanya sedikit bantuan dari dana desa tersebut bisa membantu masyarakat. Tidak dapat kita pastikan seberapa cukup untuk satu keluarga tergantung kegunaan sebisanya dimanfaatkan sebaik mungkin itu harapan kita”.

(Hasil wawancara 06, juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Nsaruddin sebagai Kepala Desa dari Desa Sedatigee Sidoarjo didapatkan pelaksanaan (Bantuan Langsung Tunai) BLT-DD untuk masyarakat yang kurang mampu yaitu tergantung bagaimana masyarakat dalam mengelola uang sebesar Rp.300,000 menjadi cukup. Sementara Bapak H.So'im selaku sekretaris Desa Sedatigede mengatakan bahwa :

”Tidak dapat kita ukur seberapa cukup uang sebesar Rp.300,000 bagi satu keluarga. Cukup tidak cukup itu memang sudah ditetapkan dari pihak atasan. Sebisanya dicukupkan digunakan kepada hal-hal yang lebih membutuhkan saja, dimasa pandemi pasti bisa mengelola keuangan. Namanya bantuan dari pemerintah sudah final adanya segitu, Penyaluran BLT sebesar Rp.300,000 memang tidak mencukupi namun ini dapat membantu ditengah-tengah sulitnya perekonomian”.

(Hasil dari wawancara 06, juni 2023)

Berdasarkan jawaban Bapak H.So'im diatas dapat diketahui bahwa kecukupan penyaluran BLT-DD dimasa sekarang tergantung kepada penguna dan pengelolaannya. Menurut Ibu Isa sebagai masyarakat Desa Sedatigede bahwa:

“Walapun jauh dari rasa cukup untuk satu keluarga yang berisikan 5 orang tidak membuat kita patah semangat untuk nafkah diluar sana”.

(Hasil dari wawancara 08, juni 2023)

Berdasarkan hasil jawaban dari masyarakat Desa Sedatigede Sidoarjo diatas memberikan jawaban yang berbeda-beda dari masyarakat berbeda memberikan jawaban terkait dengan jumlah

uang yang diperuntukan sebesar Rp.300,000 tidak sebanding dengan syarat yang diberikan pemerintah.

Dalam hasil penelitian telah membuktikan bahwa program BLT-DD di Desa Sedatigede telah berjalan dengan efektif dan efisien dan telah mencapai tujuan dari program BLT-DD desa Sedatigede yang telah di tetapkan oleh pemerintah Desa. Tujuan dari program BLT-DD di Desa Sedatigede telah tercpai, dan dengan tercapainya tujuan tersebut program BLT-DD di Desa Sedatigede mendapat banyak respon positif dari masyarakat Desa Lansot. Karena yang menjdi tujuan di adakannya program BLT-DD ini di Desa Sedatigede yaitu bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu serta untuk menopang perekonomian Desa Sedatigede.



Gambar 4.1 Besaran BLT Dana Desa
Sumber: Penyaluran BLT Dana Desa Rp300.000 tahun 2021-Sekarang

5. Responsivitas

Pada tahap pelaksanaan BLT-DD bagi masyarakat kurang mampu di desa sedatigede Sidoarjo, yaitu seberapa respon pelaksanaan yang dilakukan. Dari teori tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana respon Bapak tentang pelaksanaan Dana BLT-DD di Desa Sedatigede Sidoarjo. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nasaruddin sebagai kepala desa Sedatigede Sidoarjo, beliau mengatakan bahwa:

“Sudah cukup baik menurut aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah”.
(Hasil dari wawancara 06, juni 2023)

Berdasarkan hasil jawaban dari Indikator responsivitas dalam penyaluran BLT-DD bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Sedatigede Sidoarjo dalam pelaksanaan pihak desa menyatakan bahwa sudah cukup baik penyaluran BLT yang dilakukan yaitu sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak nasaruddin sebagai Kepala Desa dari Desa Sedatigede Sidoarjo didapatkan pelaksanaan (Bantuan Langsung Tunai) BLT-DD untuk masyarakat yang kurang mampu yaitu jelas berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa diatas maka dapat diketahui bahwa komplin mengenai pelaksanaan pernah terjadi dan juga komplin masuk

ditanggapi dengan baik oleh perangkat Desa. Sementara itu Bapak

H. So'im sebagai Sekretaris Desa mengatakan bahwa :

“Adapun komplain tetap kita terima dengan baik kita carikan solusi dan jalan keluar bersama-sama. Respon masyarakat sangat baik seperti penyaluran ini memang diperuntuk masyarakat lainnya tidak sibuk untuk mempertanyakan lagi karena sudah paham betul program pemerintah sistemnya bagaimana”.

(Hasil dari wawancara 06, juni 2023)

Sementara itu menurut masyarakat yang bersumber dari Desa

Sedatigede Sidoarjo Ibu Isa mengatakan bahwa:

“Respon kita sangat baik dengan ada program penyaluran seperti ini sangat terbantu dari segi ekonomi saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah”.

(Hasil dari wawancara 08, juni 2023)

Ibu Isa memberikan jawaban bahwa respon masyarakat sangat baik dengan kehadiran program Penyaluran BLT-DD yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pernyataan Ibu Isa diatas sejalan dengan ibu Rita yang menyatakan bahwa:

“Tentunya respon saya baik dengan ada bantuan dari pemerintah seperti ini. Jika sesuai sebagaimana yang sudah ditentukan dan sejalan dengan peraturan yang berlaku tentu respon dari masyarakat baik. Sangat baiklah respon saya kalau mengenai penyaluran dan program dari pemerintah. Respon masyarakat sebagai penerima manfaat berjalan dengan baik, sedangkan respon dari perangkat desa terhadap masyarakat yang komplain berjalan dengan kurang baik memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Respon anggota KPM berjalan dengan baik terhadap program dari pemerintah ini”.

(Hasil dari wawancara 08, juni 2023)

Beberapa informan yang bersumber dari Desa Sedatigede memberikan respon yang baik terkait dengan program ini. Berdasarkan hasil jawaban dari masyarakat Desa Sedatigede di atas memberikan jawaban yang berbeda-beda yang bersumber dari masyarakat dengan memberikan jawaban terkait dengan responsivitas menyatakan bahwa respon terhadap program pemerintah ini sangat terbantu bagi masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu.

Atas program BLT-DD Desa sedatigede serta upaya-upaya pemerintah Desa dan pihak yang berkaitan dengan BL-DD di Desa Sedatigede telah mendapat respon positif dari masyarakat. Banyak respon positif yang diberikan masyarakat dikarenakan program BLT-DD telah berjalan dengan baik di Desa Sedatigede dan mampu memenuhi apa yang menjadi tujuan Program BLT-DD di Desa Sedatigede meskipun dalam hal pemerataan program BLT-DD di Desa Sedatigede ini belum sepenuhnya merata, tetapi mayoritas masyarakat desa telah memberikan respon positif terhadap berjalannya program BLT-DD di Desa Sedatigede. Dengan adanya respon positif yang diberikan masyarakat desa terhadap Program BLT-DD, itu berarti pemerintah Desa Sedatigede serta pihak yang bersangkutan dengan program BLT-DD ini berhasil menjalankan tugasnya dalam mencapai apa yang menjadi tujuan di adanya program BLT-DD di Desa Sedatigede.

6. Ketepatan

Langkah-langkah yang di lakukan pemerintah Desa dan pihak yang terkait dengan program BLT-DD di Desa Sedatigede sudah cukup tepat, hal ini di perjelas dengan terpenuhinya tujuan dari program BLT-DD di Desa Sedatigede yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat Desa Sedatigede khususnya juga mendapat respon positif dari masyarakat karena tindakan yang di lakukan pemerintah desa dan pihak yang terkait sangat tepat dan efisien.

Pada tahap pelaksanaan BLT-DD bagi masyarakat yang kurang mampu di desa sedatigede Sidoarjo, yaitu seberapa cukup penyaluran yang dilakukan. Dari teori tersebut menimbulkan pertanyaan apakah penyaluran BLT-DD ini sudah merata? Atau ada masyarakat yang kurang mampu belum mendapatka BLT-DD ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H.So'im selaku sekretaris Desa Sedatigede , beliau mengatakan bahwa:

“Penyaluran BLT sudah tepat sasaran yaitu bertepatan pada perkonomian yang lagi sulit-sulitnya jadi dengan adanya BLT sangat terbantu masyarakat. Waktu penyaluran BLT sudah tepat sasaran serta usaha pemerintah untuk membantu sudah terlihat”.

(Hasil dari wawancara 06, juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak H.So'im selaku sekretaris Desa Sedatigede (Bantuan Langsung

Tunai) BLT-DD untuk masyarakat yang kurang mampu sudah tepat sasaran dan sangat membantu masyarakat yang kurang mampu.

Penyaluran BLT-DD bagi masyarakat kurang mampu di Seatigede dalam penyaluran pihak desa menyatakan bahwa sudah cukup tepat dalam penyaluran BLT-DDnya yang kemudian nantinya akan diserahkan kepada perangkat Desa harapannya adalah perangkat Desa mengelola pemerintah Desa sendiri agar tepat guna tepat sasaran yang diamanatkan agar dapat tersalurkan dengan baik.

Bapak Nasaruddin , beliau mengungkapkan :

“Sejauh ini pelaksanaan BLT-DD sudah tepat sasaran, karena kami benar-benar mendata dan mensurvei langsung kepada masyarakat kurang mampu yang berada di desa Sedatigee ini”.

(Hasil dari wawancara 06, juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Nasaruddin selaku kepala desa SedatiGede Sidoarjo didapatkan pelaksanaan (Bantuan Langsung Tunai) BLT-DD untuk masyarakat yang kurang mampu yaitu jelas berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa diatas maka dapat diketahui bahwa tepat sasaran pelaksanaan dalam bentuk bantuan dari pemerintah perangkat Desa dapat menyelesaikan dengan baik setiap komplain dari masyarakat. Sementara Bapak Nasaruddin mengatakan bahwa ada masyarakat yang dikatakan kurang mampu tapi tidak di mendapatkan BLT-DD ini:

“Harus tepat sasaran kepada yang membutuhkan dan sebagaimana di ketahui pelaksanaan BLT-DD ini diperuntukan untuk anggota KPM yaitu Keluarga Penerima Manfaat adalah orang-orang yang dipilih dan layak dibantu oleh pemerintah”.
(Hasil dari wawancara 06, juni 2023)

Berdasarkan jawaban dari bapak Nasaruddin selaku kepala desa diatas dapat diketahui bahwa ketepatan yang bersumber dari pendataan perangkat desa diupayakan oleh perangkat Desa semaksimal mungkin agar penyaluran tersampaikan dengan baik kepada masyarakat yang berhak dibantu oleh pemerintah. Sementara itu menurut informan yang bersumber dari masyarakat Sedatigede, ibu Rita mengatakan bahwa:

“Tepat dan tidak tepat itu tergantung pemerintah atau bagian penyaluran dalam mendata, karena jika sudah terdata itu akan tau berapa jumlah yang masuk dalam kategori pelaksanaan BLT-DD dalam bentuk tunai”.
(Hasil dari wawancara 08, juni 2023)

Menurut Ibu Rita lebih baik diserahkan semuanya kepada pemerintah, pemerintah lebih paham dan mengetahui keadaan yang sesungguhnya di lapangan bagaimana, selain itu Ibu Rita beranggapan bahwa semuanya terlebih dahulu terdata sehingga siapa yang berhak dan tidak itu sudah terdata di pusat dan bukan diperangkat Desa untuk hasil akhirnya. Menurut ibu Sunarti, bahwa:

“Diluar kendala dan hambatan belum cukup baik menurut saya penyalurannya, tetapi sebelumnya terimakasih untuk pemerintah dan perangkat Desa yang perhatian kepada masyarakat yang ekonominya kelas bawah, dan semoga

bantuan seperti ini tidak putus, namun juga terus hadir dengan perubahan-perubahan yang baru”.
(Hasil dari wawancara 09, juni 2023)

Berdasarkan penjelasan dari ibu Sunarti, pemerintah sudah memberikan yang terbaik dengan banyaknya program bantuan yang dikeluarkan seperti BLT-DD ini, ibu Isa juga menyampaikan bahwa jangan berhenti program Bantuan Langsung Tunai ini harus terus berjalan. Berdasarkan hasil jawaban dari masyarakat Sedatigede Sidoarjo, ketepatan menyatakan bahwa diluar kendala dan hambatan yang secara teknis ditemui dilapangan sejauh pelaksanaan dapat berjalan ini sudah menunjukan bahwa pemerintah baik perangkat desa sudah berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

Tentu, hasil positif yang dihasilkan oleh program BLT-DD di Desa Sedatigede yang berjalan dengan baik sangat penting dan berguna bagi masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Program tersebut memberikan manfaat yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Melalui program BLT-DD, masyarakat kurang mampu di Desa Sedatigede dapat menerima bantuan langsung tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, sandang, dan pelayanan kesehatan. Dalam banyak kasus, program bantuan seperti ini dapat menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat kurang mampu dapat merasakan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini juga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan, memberikan keamanan pangan, dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, program BLT-DD juga dapat berdampak positif pada perekonomian Desa Sedatigede secara keseluruhan. Bantuan tunai yang diterima oleh masyarakat akan dihabiskan dalam lingkungan lokal, sehingga meningkatkan daya beli dan menggerakkan aktivitas ekonomi di desa tersebut. Dengan demikian, program ini dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Penting untuk memastikan bahwa program BLT-DD ini berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Evaluasi yang terus-menerus dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan program ini dapat membantu meningkatkan efektivitasnya dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Secara keseluruhan, program BLT-DD yang berjalan dengan baik di Desa Sedatigede memberikan dampak positif yang sangat berarti bagi masyarakat kurang mampu, membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan berpotensi meningkatkan perekonomian desa secara keseluruhan.

4.2 Faktor Penghambat atau Pendukung Dalam Penerimaan BLT-DD

Pada setiap Pelaksana sebuah kebijakan atau program, tentunya memiliki hambatan tersendiri yang dialami oleh para pelaksana. Begitu juga dengan pelaksana Pelaksanaan BLT-DD Bagi Masyarakat yang kurang mampu di Desa Sedatigede Sidoarjo. Setelah mengetahui hambatan yang dialami, diharapkan mampu memberikan solusi yang dapat memperbaiki kinerja implementor dimasa yang akan datang, berikut peneliti tampilkan hasil jawaban yang didapatkan mengenai faktor pendukung dan penghambat adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, hal-hal yang mendukung terselenggaranya penyaluran BLT-Dana Desa dengan baik adalah melalui :

a) komunikasi

Baik antara pemerintah desa, pemerintah desa dan juga masyarakat. Hal tersebut dapat didukung melalui adanya komitmen pemerintah untuk menyalurkan BLT, pemahaman dan pemberian tugas pihakpihak yang bertanggung jawab, dan adanya penyampaian informasi yang baik di semua pihak.

b) Sumber daya yang memadai

Terdiri atas sumber daya manusia yang berkompeten untuk menangani dan mengurus penyaluran BLT-DD, sumber daya informasi yang dimiliki masyarakat sebagai target utama dilakukannya program bantuan langsung tunai, wewenang yang diberikan

kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, dan fasilitas seperti saran prasarana yang juga ikut menunjang keberhasilan penyaluran BLT-DD.

c) Struktur birokrasi

Upaya yang dilakukan untuk mendorong kinerja organisasi kearah yang lebih baik adalah melalui Standar operasional Prosedur (SOP) seperti Peraturan yang sifatnya mengani bantuan pemerintah.

d) Dukungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah guna keberhasilan Bantuan Langsung Tunai

Dukungan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu memutuskan masyarakat yang berhak dan telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan dalam musyawarah desa agar tidak terjadi kecemburuan masyarakat.

2. Faktor Penghambat

a. Sumberdaya pendukung

Sumber daya pendukung dalam penyaluran BLT-DD belum mampu. Untuk mengatasinya, dibutuhkan penanganan cepat dan tepat, termasuk dalam pembaruan data, apalagi dimasa sekarang menyebabkan perluasan sasaran penerima bantuan social salah

satunya adalah penyaluran BLT-DD. Kebutuhan sumber daya untuk pembaruan data cukup besar Sementara banyak daerah yang tidak memiliki SDM untuk pembaruan data dan belum semua pemerintah daerah secara aktif mendukung pembaruan data.

b. Kurangnya informasi tentang kegiatan

Minimnya informasi yang tersampaikan di masyarakat menjadikan program penyaluran BLT-DD di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu kurang efektif seperti pendataan yang tidak diperbaharui terdapat masyarakat yang seharusnya berhak 118 mendapatkan. Namun karena faktor tidak terdata pada program pemerintah sebelumnya menjadikan hambatan untuk ikut dan dapat program penyaluran BLT-DD dari pemerintah ini.

c. Persepsi masyarakat yang keliru terhadap program

Terdapat masyarakat yang keliru terhadap program penyaluran BLTDD di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu masyarakat beranggapan bahwa penyaluran ini disediakan untuk setiap masyarakat yang terdampak Covid-19 nyatanya penyaluran BLT terdata dan diambil dari PKM (Keluarga Penerima Manfaat).

d. Sumber daya yang memadai yaitu terdiri atas sumber daya manusia yang berkompeten untuk menangani dan mengurus penyaluran BLT, sumber daya informasi yang dimiliki masyarakat sebagai

- target utama dilakukannya program bantuan langsung tunai, wewenang yang diberikan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, dan fasilitas seperti saran prasarana yang juga ikut menunjang keberhasilan penyaluran BLT.
- e. Struktur birokrasi yakni upaya yang dilakukan untuk mendorong kinerja organisasi kearah yang lebih baik adalah melalui Standar operasional Prosedur (SOP) seperti Peraturan yang sipatnya mengani bantuan pemerintah.
 - f. Dukungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah guna Keberhasilan Bantuan Langsung Tunai Dukungan antara pemerintah 103 desa dan pemerintah daerah juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu memutuskan masyarakat yang berhak dan telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan dalam musyawarah desa agar tidak terjadi kecemburuan masyarakat.

4.3 Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Sedatigede Sidoarjo

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilaksanakan kalau suatu kebijakan sudah

berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya, 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak ditetapkannya kebijakan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan implementasi BLT-Dana Desa di Desa Sedatigede, yang sudah dilaksanakan untuk membantu keluarga miskin, maka evaluasi terhadap program tersebut dapat mencakup tentang tiga hal yaitu evaluasi terhadap isi kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi terhadap dampak kebijakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dimana disebutkan bahwa 35% dari Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk memberikan bantuan berupa uang tunai kepada KK miskin dalam Program BLT-Dana Desa. Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH (Program Keluarga Harapan), atau BPNT yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan

sakit. Setelah berlangsung lebih dari setahun, program tersebut dianggap berhasil meningkatkan daya beli dan perekonomian keluarga miskin.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, yakni Perangkat desa dan masyarakat Sedatigede Sidoarjo, kepala Desa Sedatigede BLT-Dana Desa, dapat diketahui bahwa evaluasi terhadap isi kebijakan Program BLT-Dana Desa telah dilakukan dan hasilnya cukup mengembirakan dimana program tersebut dirasa cukup berhasil mencapai tujuannya yakni menumbuhkan perekonomian dan menumbuhkan daya beli masyarakat miskin. Evaluasi tersebut merupakan evaluasi atau penilaian terhadap isi kebijakan. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu menumbuhkan daya beli dan meningkatkan perekonomian keluarga miskin supaya kehidupannya tidak semakin terhimpit akibat kehilangan pekerjaan.

Secara umum evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan. Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Menurut Lester dan Stewart menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang

telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Ada dua fungsi evaluasi yaitu, pertama evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihantujuan dan target.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan program BLT-Dana Desa dapat dilihat dari proses dan periode pencairan uang tunai bantuan BLT-Dana Desa serta pelaksana dari BLT-Dana Desa tersebut.

Menyimak pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, didukung dengan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian, beberapa hal yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Sedatigede adalah periode pencairan yang 3 (tiga) bulan sekali dirasa cukup lama bagi keluarga kurang mampu. Mereka inginnya bisa cair sebulan sekali. Kalau masalah proses pencairan dengan memberikan uang tunai secara langsung kepada keluarga miskin penerima bantuan itu sudah tepat karena uangnya bisa langsung digunakan untuk membeli kebutuhan hidup keluarganya. Evaluasi juga berkaitan dengan tempat dan waktu pembagian uang tunai tersebut, dimana untuk mencegah terjadinya kerumunan saat pembagian uang tunai, hendaknya dilaksanakan di masing-masing dusun. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan memang perlu dilaksanakan supaya terjadi perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan

tersebut kedepannya, sesuai dengan yang disampaikan bahwa penilaian atau evaluasi kebijakan dapat mencakup diantaranya tentang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Evaluasi terhadap dampak kebijakan, termasuk program BLT-Dana Desa di Desa Sedatigede, merupakan langkah penting dalam menilai konsekuensi yang timbul akibat implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi dampak bertujuan untuk mengevaluasi secara lebih mendalam tentang efek positif dan negatif yang terjadi pada masyarakat sebagai akibat dari program tersebut. Dalam evaluasi dampak kebijakan, penting untuk memperhatikan dampak positif yang diharapkan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan publik, dan peningkatan perekonomian lokal. Evaluasi juga harus memperhatikan dan mengidentifikasi dampak negatif yang mungkin muncul, seperti ketimpangan dalam distribusi bantuan, ketidakadilan dalam pendataan penerima, atau adanya ketergantungan yang tidak diinginkan terhadap bantuan tersebut.

Tujuan dari penanggulangan kemiskinan tersebut mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi dengan memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Namun, meskipun kriterianya demikian, ternyata orang yang mendaftar melambung tinggi, banyak orang yang mendadak miskin pasca adan. Hal ini juga disebabkan adanya petugas pendata atau aparat desa yang sengaja memasukkan anggota keluarganya atau kerabatnya yang sebenarnya tidak miskin. Peluncuran program Bantuan Sosial yang

sentralistik (top-down planning) memberikan keterlibatan tertentu pada tingkat penerapannya. Dan adapun mekanisme program yang dirancang sehingga tidak cukup memadai mengakomodasi berbagai karakteristik dan tuntutan local.

Pada kenyataannya dilapangan Program Bantuan Sosial hanya sebagai program dadakan yang untuk mengejar target untuk meredam gejolak sosial akibat adanya Pandemi COVID-19 ini. Hal ini dampak dari sempitnya waktu yang tersedia untuk memverifikasi data rumah tangga miskin,. Mulai dari mengkoordinasikan kegiatan penyimpanan data rumah tangga miskin sampai menyiapkan dan mengelompokkan katu tanda pengenal rumah tangga miskin serta memberikan akses data untuk instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Maka adanya isu yang mencuat ke pada masyarakat adanya masalah pendataan yang berakibat pada sasaran yang tidak tepat dan ketidakpuasan masyarakat atas pendistribusian program bantuan sosial.

Dengan mengevaluasi dampak kebijakan, pemerintah desa dapat mengidentifikasi kelemahan dan masalah yang perlu diperbaiki dalam implementasi program BLT-Dana Desa. Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian kebijakan dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan efektivitas serta manfaat dari program tersebut. Evaluasi dampak kebijakan merupakan upaya yang penting dalam siklus kebijakan publik, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk memperbaiki

program dan menjaga keseimbangan antara manfaat dan dampak yang dihasilkan.

Dari sudut spesifikasi objeknya berarti menilai hasil pelbagai macam program yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan problema-problema yang dihadapi oleh masyarakat, seperti misalnya dibidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, penanggulangan kemiskinan, dan sebagainya apakah telah terlaksana dengan baik atau belum. Dari sudut teknik-teknik penilaian yaitu cara-cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menilai hasil program-program pemerintah tadi. Kemudian dari sudut metode analisisnya akan dapat menunjukkan hasil akhir (kesimpulan) dari kegiatan menilai program-program pemerintah tersebut, yaitu apakah efektif atau tidak, mempunyai dampak positif yang lebih besar dari dampak negatifnya atau sebaliknya.

Keberhasilan Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Penanganan Kemiskinan Di Desa Sedatigede Sidoarjo. Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di desa Sedatigede Sidoarjo sudah lumayan baik dan sudah efektif karena pelaksanaan program tersebut dimulai dari prosesnya yang masih baik yaitu pendataan yang sudah merata dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik.

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang ada di desa tersebut tapi karena minimnya dana yang diberikan perbulan

yang mengakibatkan hanya dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok saja itupun dalam jangka pendek sehingga tidak mengubah kondisi masyarakat miskin yang ada di desa Sedatigede Sidoarjo sehingga hasil atau indikator output belum baik. Berdasarkan hambatan-hambatan yang terjadi mulai dari indikator proses dan indikator output sehingga indikator outcomes dikatakan kurang baik.

Terima kasih atas informasi tambahan mengenai evaluasi penerima bantuan langsung tunai (BLT-DD) di Desa Sedatigede. Memang penting untuk melakukan evaluasi penerima secara berkala, terutama dalam kondisi di mana keadaan masyarakat dan jumlah penduduk mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Melakukan evaluasi penerima bantuan secara rutin dan berkala membantu memastikan bahwa bantuan langsung tunai diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan adanya evaluasi penerima, pihak aparat desa dapat memastikan bahwa penduduk baru atau mereka yang belum terdaftar sebelumnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari program BLT-DD.

Evaluasi penerima bantuan langsung tunai perlu mencakup penilaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti tingkat kemiskinan, kebutuhan mendesak, atau kondisi sosial-ekonomi keluarga. Dalam proses evaluasi, musyawarah dan keterlibatan berbagai pihak, seperti aparat desa dan masyarakat, penting dilakukan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pemilihan penerima. Dengan melakukan evaluasi penerima secara teratur, pemerintah desa dapat

mengidentifikasi perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta memastikan bahwa bantuan langsung tunai diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Hal ini membantu menjaga keberlanjutan program dan memastikan bahwa dana bantuan digunakan secara tepat sasaran.

Penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi penerima, sehingga dapat tercipta kepercayaan dan partisipasi yang lebih baik dalam program BLT-DD. Masyarakat juga dapat memberikan masukan dan saran terkait perubahan atau penyesuaian kriteria penerima bantuan yang lebih akurat dan berkeadilan. Dengan pendekatan yang transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, evaluasi penerima bantuan langsung tunai dapat membantu meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam program BLT-DD di Desa Sedatigede.

Proses penerima penyaluran dana bantuan langsung tunai dilakukan secara langsung kepada masyarakat penerima bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai ini diterima langsung oleh si penerima tidak diperbolehkan untuk diwakilkan kepada orang lain terkecuali anggota keluarga si penerima yang tertera di Kartu Keluarga, jadi jika si penerima berhalangan atau sakit dapat diwakilkan oleh anggota keluarga saja yang ada di kartu keluarga si penerima tersebut.

Analisis evaluasi penerima bantuan langsung tunai (blt) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dalam penguatan evaluasi penerima bantuan langsung tunai di Kecamatan Teupah Selatan

merujuk kepada evaluasi mengukur kemajuan. Ukuran evaluasi kemajuan adalah kegiatan yang dirancang untuk mengukur dan kemudian mengevaluasi sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Jika tujuan yang dikembangkan tercapai secara bertahap, evaluasi berkelanjutan dapat dilakukan untuk memeriksa tahapan mana yang telah selesai, tahapan mana yang berjalan lancar, dan tahapan mana yang bermasalah dalam pelaksanaannya.

Evaluasi penerima bantuan langsung tunai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Desa Sedatigede Sidoarjo kedalam evaluasi mengukur kemajuan, merupakan suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala desa dan aparat desa, yang menggunakan evaluasi mengukur kemajuan dengan menerapkan syarat-syarat dan kriteria yang berhak untuk menerima bantuan langsung tunai.

Evaluasi dampak dana bantuan langsung tunai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, pertama bantuan langsung tunai belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, dana bantuan langsung tunai terbilang sedikit sehingga bantuan ini tidak dapat menutupi ekonomi masyarakat, namun bagi masyarakat dengan adanya bantuan ini lebih kurangnya dapat membantu sedikit demi sedikit ekonomi masyarakat. Kedua adanya kecemburuan social masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai juga ingin mendapatkan bantuan tersebut.

Terima kasih atas informasinya. Jika berdasarkan hasil penelitian terdapat kesimpulan bahwa program BLT-DD di Desa Sedatigede telah berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari sebagian besar masyarakat, itu merupakan pencapaian yang baik bagi pemerintah desa dan pihak terkait. Pemerintah Desa Sedatigede patut diapresiasi atas usaha-usahanya dalam mensejahterahkan masyarakat dan menopang ekonomi Desa Sedatigede melalui program BLT-DD. Penting untuk diingat bahwa tidak mungkin memenuhi semua harapan dan kebutuhan setiap individu atau rumah tangga di Desa Sedatigede dengan program BLT-DD. Namun, apabila mayoritas masyarakat memberikan respon positif, itu menunjukkan bahwa program tersebut memberikan manfaat dan memberikan dampak yang dirasakan oleh sebagian besar penerima.

Meskipun ada beberapa masyarakat yang masih menganggap bahwa program BLT-DD belum berjalan dengan baik, hal tersebut menunjukkan pentingnya terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah desa perlu terus memperhatikan masukan dan keluhan masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi program. Upaya-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan pihak terkait dalam menjalankan program BLT-DD di Desa Sedatigede, seperti meningkatkan sosialisasi, transparansi dalam penyaluran dana, dan evaluasi penerima, merupakan langkah positif untuk mencapai tujuan program tersebut.

Pemerintah desa perlu terus berkomitmen untuk meningkatkan program BLT-DD dan memastikan bahwa dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Evaluasi berkelanjutan, partisipasi aktif masyarakat, dan keterlibatan seluruh stakeholder terkait akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan program BLT-DD dan mewujudkan tujuan pemerintah desa Sedatigede dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi desa. Penting untuk terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan program BLT-DD di Desa Sedatigede tetap efektif dan berkesinambungan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasaruddin selaku Kepala Desa Sedatigede Sidoarjo apakah pelaksanaan BLT-DD ini sudah berjalan dengan efektif, beliau mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.
(Hasil dari wawancara 06, juni 2023)

Bapak Nasaruddin mengatakan bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini sudah berjalan efektif . Sedangkan Bapak H.So'im mengatakan bahwa :

“Sebisa mungkin kami akan membantu masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan bantuan ini”.
(Hasil dari wawancara 06, juni 2023)

Hasil dari wawancara kepala desa dan sekretaris Desa Sedatigede Sidoarjo mengatakan bahwa perangkat desa akan semaksimal mungkin membantu

dan mendata warganya yang benar-benar layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini.

Untuk bantuan sosial itu sendiri itu bisa berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial.

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang banyak salah sasaran secara langsung memberikan dampak buruk kepada kebijakan bantuan sosial itu sendiri, karena mengingat tujuan bantuan sosial untuk melindungi bagi masyarakat miskin yang menjadi tidak optimal, sehingga sebagian masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan sosial akan tetap memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya upaya untuk memperbaiki kebijakan bantuan sosial ini khususnya dalam masalah penetapan rumah tangga sasaran, sehingga kedepannya kebijakan bantuan sosial, baik yang akan diberikan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah akan berjalan dengan optimal dan berdampak secara positif bagi rumah tangga sasaran.

Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan. Kedua, perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi ketidakjelasan informasi. Ketiga, perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat terhadap kegiatan keagamaan hingga

kebudayaan. Keempat, perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama ini.

Dana bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kata lain program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial, makanya diberikan berbagai bantuan seperti bantuan dana kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin. Pemberian dana kompensasi diupayakan merata di tiap kabupaten berdasarkan kepada kriteria yang diberikan oleh Departement Komunikasi dan Informatika.

Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa, maka pemerintah mengalokasikan dana desa agar bias membantu perputaran ekonomi dan membantu kesulitan ekonomi yang di alami oleh masyarakat tingkat desa di desa Sedatigede Sidoarjo. Dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Penyaluran bantuan dengan menggunakan dana desa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berada di wilayah desa. Pengalokasian dana yang di terima harus digunakan dengan cara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui bebrapa proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi yang jelas berdasar

prinsip yang telah ditetapkan. Seluruh laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dana bantuan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kata lain program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial, makanya diberikan berbagai bantuan seperti bantuan dana kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin. Pemberian dana kompensasi diupayakan merata di tiap kabupaten berdasarkan kepada kriteria yang diberikan oleh Departement Komunikasi dan Informatika.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, serta menjawab rumusan masalah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran BLT bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Sedatigede Sidoarjo dari indikator efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran belum efektif, yaitu dibuktikan dengan setiap permasalahan baik yang bersumber dari masyarakat kepada pemerintah dan perangkat desa menunjukkan bahwa setiap permasalahan mengenai penyaluraan BLT-DD nya belum terselesaikan dengan baik.
2. Faktor pendukung dalam Penyaluran BLT bagi masyarakat kurang mampu di Desa Sedatigede Sidoarjo adalah dikarenakan komunikasi, sumber daya yang memadai, struktur birokrasi, dan Dukungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah guna keberhasilan Bantuan Langsung Tunai. Adapaun faktor hambatan yang pertama meliputi sumber daya pendukung seperti Kebutuhan sumber daya untuk pembaruan data cukup besar Sementara banyak daerah yang tidak memiliki SDM untuk pembaruan data dan belum semua pemerintah daerah

secara aktif mendukung pembaruan data, kedua kurangnya informasi tentang kegiatan. Minimnya informasi yang tersampaikan di masyarakat menjadikan program penyaluran BLT-DD di Desa Sukamaju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu kurang efektif, dan yang ketiga adalah mengenai persepsi masyarakat yang keliru terhadap program seperti beranggapan bahwa pelaksanaan ini disediakan untuk setiap masyarakat yang diambil dari PKM.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran, adapun saransaran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya ada peran aktif pemerintah yang mana di wakili oleh kecamatan agar tidak melimpahkan sepenuhnya kepada perangkat Desa dalam penyaluran BLT-DD. Diharapkan Pemerintah dapat mengatasi permasalahan mengenai Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa ini.
2. Sebaiknya untuk Perangkat Desa lebih memaksimalkan lagi dalam penyaluran BLT-DDnya dari segi musyawarah penyampaian mengenai penyaluraan BLT-DDnya sampai kepada pendataan.
3. Untuk masyarakat baik ini merupakan masyarakat yang termasuk kedalam Keluarga Penerima Manfaat yang terpilih

sebagai penerima dari penyaluran BLT-DD ini segera melaporkan atau dilakukan pengaduan apabila merasa belum terpenuhi hak-haknya, sedangkan untuk masyarakat yang belum terpilih sebagai penerima dari penyaluran BLT-DD ditengah masa pandemi ini untuk lebih sabar kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, W., Yamin, M. N., Cudai, A. N., Studi, P., Administrasi, I., & Sosial, F. I. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanganan Kemiskinan di Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. *Pinisi Journal of Social Science*, *1(1)*, 21–26.
- Masambe, R. G., Tulusan, F. G., & Plangiten, N. N. (2021). Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. *Jap*, *107(VII)*, 65–72.
- Pratiwi, S. M., & Sukmana, H. (2022). Implementasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di desa mojoruntut kecamatan krebung sidoarjo. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan ...*, *8(2)*, 463–474. <https://doi.org/10.53565/pssa.v8i2.516>
- Redana, D. N., & Suprpta, I. N. (2022). Evaluasi Program Blt-Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *Locus*, *14(2)*, 84–99. <https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.1023>
- Rijali, S., Studi Administrasi publik, P., Tinggi Ilmu administrasi Tabalong Komplek Stadion Olahraga Sarabakawa, S., Pembataan, K., Murung Puduk, K., Tabalong, kabupaten, & Kalimantan Selatan, P. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Japb*, *4*, 1670.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, *VII(108)*, 78–89.
- Wibawani, S., Hernanda, F., Kusuma, R. G., & Irawan, F. A. (2021). Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Syntax Idea*, *3(5)*, 1205.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara

Judul Skripsi : Evaluasi kebijakan Pelaksanaan BLT-DD di Sedatigede Sidoarjo

Permasalahan :

1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Sedatigede ?
2. Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Bantuan Langsung Dana Desa di Sedatigede ?
3. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Dana Desa di Sedatigede ?

Rumusan Masalah 1

1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Sedatigede ?
 - a. Efektifitas
 1. Apakah BLT-DD ini sudah mampu mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan ?
 2. Apakah kebijakan BLT-DD ini dikatakan efektif bagi masyarakat Sedatigede ?

Masyarakat :

1. Apakah program BLT-DD yang dikeluarkan oleh pemerintah berdampak positif bagi masyarakat, sekarang ini ?
- b. Efisiensi

1. Bagaimana kemampuan staff dalam menjalankan kebijakan ini, apa sudah sesuai dengan prosedur atau sudah sesuai dengan yang diharapkan ?
2. Apakah balai desa menyediakan fasilitas yang cukup dalam pelaksanaan BLT-DD untuk memperlancar prosesnya ?

Masyarakat :

1. Menurut bapak/ibu BLT-DD ini apakah sudah sesuai dengan prosedur yang diharapkan oleh masyarakat ?

c. Perataan

1. Apakah menurut bapak penyaluran BLT-DD ini sudah merata ? atau ada masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan BLT-DD ini ?
2. Nah apabila terdapat masyarakat yang belum mendapatkan BLT-DD ini padahal masyarakat tersebut bisa dikatakan kurang mampu, bagaimana tanggapan bapak sendiri ?

Masyarakat :

1. Apakah menurut ibu penyaluran BLT-DD ini sudah merata ?

d. Kecukupan

1. Dengan adanya BLT-DD ini apakah sudah cukup membantu ?

Masyarakat :

1. Dengan adanya BLT-DD ini menurut bapak/ibu apakah sudah cukup membantu ?

e. Responsivitas

1. Bagaimana respon bapak dengan adanya bantuan BLT-DD dari pemerintah ini ?

Masyarakat :

1. Apa tanggapan bapak/ibu dengan adanya BLT-DD ini ?

f. Ketepatan

1. Menurut bapak sendiri sebagai kepala desa di desa Sedatigede ini, apakah dalam penyaluran BLT-DD sekarang ini sudah dapat dipastikan tertuju kepada masyarakat yang kurang mampu ?

Masyarakat

1. Apakah BLT-DD menurut bapak/ibu itu sudah tepat ? Dalam artian apakah sudah tertuju kepada masyarakat yang membutuhkan ?

Rumusan Masalah 2

Apa saja Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Bantuan Langsung Dana Desa di Sedatigede ?

1. Menurut bapak apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan BLT-DD ini ?
2. Apakah faktor tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan BLT-DD ?

Masyarakat :

1. Menurut ibu/bapak apakah ada faktor penghambat atau pendukung dalam penerimaan BLT-DD ini ?

Rumusan Masalah 3

Bagaimana Evaluasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Dana Desa di Sedatigede ?

1. Apakah pelaksanaan BLT-DD selama ini telah berjalan efektif ?
2. Bagaimana efisiensi dari pelaksanaan BLT-DD ? dan bagaimana cara balai desa Sedatigede kedepannya agar dapat lebih efisien ?
3. Apa saja yang dilakukan balai desa Sedatigede dalam menunjang pelaksanaan BLT-DD ?

LEMBAR SURAT IZIN PENELITIAN



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI

Administrasi Publik : 4119/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VI/2022
Ilmu Komunikasi : 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017
Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602, Ex. 120, 121 Fax. 031 - 8285601

Nomor : 217 /V/2023/FSP/UBHARA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan ijin Penelitian & Survey

Surabaya, 6 Juni 2023

Kepada
Yth. Balai Desa Sedatigede
Jl. H. Abdul Rahman No.65,
Hono, Sedati Gede, Kec.
Sedati, Kabupaten Sidoarjo
di
Sidoarjo

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka usaha untuk menyusun suatu laporan penelitian/menyusun skripsi bagi mahasiswa/i tingkat akhir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan guna melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.
2. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:
Nama : Indriani
Nim : 1913111045
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan BLT-DD di Sedatigede Sidoarjo
Tempat Penelitian : - Balai Desa Sedatigede
Lama Penelitian : 3 Bulan
3. Atas segala bantuan yang diberikan demi keberhasilan penelitian tersebut kami sampaikan terima kasih.



Dr. Tri Prasetyowati, M.Si.

TEMBUSAN : Yth.
- Kepala LPPM UBHARA

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara, 6 juni 2023

Dokumentasi wawancara dengan bapak Muhammad Nasruddin sebagai Kepala Desa Sedatigede Sidoarjo



Dokumentasi wawancara, 6 juni 2023

Dokumentasi wawancara dengan Bapak H. So'im sebagai Sekretaris Desa Sedatigede Sidoarjo



Dokumentasi wawancara, 8 juni 2023

Dokumentasi wawancara dengan Ibu Isa Masyarakat Desa Sedatigede Sidoarjo



Dokumentasi wawancara, 8 juni 2023

Dokumentasi wawancara dengan Ibu Rita Masyarakat Desa Sedatigede Sidoarjo



Dokumentasi wawancara, 9 juni 2023

Dokumentasi wawancara dengan Ibu Sunarti Masyarakat Desa Sedatigede Sidoarjo